

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*.
PTIK. Jakarta.

Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Tangerang.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Sinar Grafika. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian penyakit. 2020. *PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

King Sulaiman, King. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*. Thafamedia. Yogyakarta.

Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press. Jakarta.

Jimly Asshiddiq, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group. Depok.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Maria Parida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta.

Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Precana. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan HR. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang

W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Skripsi

Hendra Rusliyadi. *Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 813/Pid.B/2011 PN.Dps)*. 2016. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Jurnal

Bivitri Susanti. 2017. *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Jentera Volume 1 No. 2. Jakarta.

Ni'matul Huda. 2006. *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*. UII Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13. Yogyakarta.

Wicipto Setiadi, 2009, *SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, Kementerian Hukum dan Ham. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, *YURIDIKA No. 5&6 Tahun XII, September-Desember*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.

Internet

[Covid19.go.id](https://www.covid19.go.id), diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>. di Akses pada tanggal 2 Juli 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Andi Pangerang Pettarani No. 59, Telp. (0411) 452971 Fax. (0411) 452317
MAKASSAR 90222

Makassar, 25 Juli 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
di, -

Makassar

Nomor : 070 / 3506 / Dissos
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Memenuhi maksud Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 5298/S.01/PTSP/2022 Tanggal 13 Juli 2022 perihal sama pokok surat diatas, kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dari Dinas Sosial Provinsi Sul-Sel menerima/menyetujui permohonan Izin Penelitian Mahasiswa, dengan melampirkan bukti vaksinasi dan siap untuk melanjutkan tahap vaksin sesuai ketentuan yang berlaku, demi mencegah penularan Covid-19. Adapun mahasiswa yang Izin Penelitian yaitu :

Nama : ADJIE JALU PRASETYO
No. Pokok : B021171331
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Penelitian : " Tinjauan Normatif Pemberiaan Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi "

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Drs. H. ANDI IRAWAN BINTANG, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

N.I.P. 19640217 198903 1 010